

PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT DI DALAM KAWASAN HUTAN (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA-DESA SEKITAR AREAL IUPHHK DI KABUPATEN MAMUJU, PROVINSI SULAWESI BARAT)

The development of community-based enterprises in the forest areas (case study of villages surrounding IUPHHK of Mamuju Regency, West Sulawesi Province)

Supratman

Abstract

The study was aimed to identify the characteristics of the community surrounding the area of IUPHHK to formulate the concept of community-based enterprises development in the forest.

The study was carried out in Tassokko Village of Karossa District, and Tabolang Village of Topoyo District. Data were gathered by survey, interviews, Focus Group Discussion (FGD), and documentary study. Then, the data were analyzed qualitatively and quantitatively.

The results indicate that there were acculturation process occurred in agricultural cultivation and forestry knowledge between the natives and the newcomers regarding the management of forest resources. The common problems of forest management covered economical, social, and institutional problems. The concept of community development enterprises consists of production system development, enterprise institutional development, and supporting system development.

Keywords: *enterprise, community, village, forest*

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi sumberdaya hutan yang relatif besar yaitu seluas 1.178.996 ha atau sebesar 70% dari luas wilayah. Pada saat ini tercatat 3 (tiga) perusahaan HPH/IUPHHK yang masih aktif dari 9 HPH/IUPHHK yang pernah ada yaitu: (1) PT. Rante Mario, (2) PT. Inhutani I UMH Mamuju, dan (3) PT. Zedsko Permai. Ketiga HPH/IUPHHK. Dapat pula dikatakan bahwa saat ini terdapat sebanyak 6 HPH/IUPHHK yang tidak aktif melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan karena telah berakhir izin konsesi atau masih berlaku izin konsesi akan tetapi

tidak aktif melakukan kegiatan di lahan.

Areal HPH yang tidak aktif tersebut di atas, bersifat open access sehingga mendapatkan tekanan dari masyarakat di sekitar hutan yang menyebabkan terjadinya degradasi hutan saat ini sebesar 20%. Di lain pihak, sumberdaya hutan tersebut harus dikelola untuk tujuan yang sesuai dengan fungsinya.

Keadaan tersebut di atas menunjukkan bahwa pembangunan kehutanan perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, serta melestarikan fungsi kawasan hutan. Oleh karena itu, diperlukan konsep pengembangan usaha masyarakat di dalam kawasan

hutan yang dapat memenuhi tuntutan pengelolaan tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui karakteristik masyarakat di sekitar areal IUPHHK dan merumuskan konsep pengembangan usaha masyarakat di dalam kawasan hutan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Karossa dan Kecamatan Topoyo. Desa-desa yang disurvei adalah yang berbatasan langsung dengan areal HPH/IUPHHK. PT. Zedsko Permai, HPH/IUPHHK. PT. Rante Mario, dan HPH/IUPHHK. PT. Hayam Wuruk, yaitu:

1. Kampung Salu Bijau, Dusun Salu Bijau, Desa Tassokko, Kecamatan Karossa.
2. Kampung Salu Lebo, Dusun Salu Lebo, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo.
3. Kampung Batu Dinding, Dusun Salu Lebo, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo.

B. Pengumpulan dan Analisa Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat, Dinas Kehutanan, dan pemerintah desa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peta, dokumen, laporan, statistik, dan referensi lainnya.

Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan jenis data dan tujuan analisis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Masyarakat di Sekitar Hutan

1. Penduduk

Masyarakat desa-desa di lokasi penelitian dicirikan oleh tingginya migrasi masuk penduduk, terutama migrasi dari Sulawesi Selatan. Tujuan utama migrasi adalah untuk mendapatkan lahan usahatani kakao. Sebagian diantaranya juga berdagang faktor-faktor produksi usahatani atau berdagang hasil usahatani.

Berdasarkan hasil FGD ditemukan bahwa masyarakat desa-desa di lokasi penelitian didominasi oleh masyarakat pendatang dan umumnya mereka satu rumpun keluarga. Hal ini menyebabkan aktifitas mereka biasanya dilakukan secara kolektif. Daerah asal pendatang adalah Kabupaten Bone, Soppeng, Polman, Mamasa dan Kabupaten Tana Toraja.

Masyarakat pendatang mulai merambah kawasan hutan areal HPH/IUPHHK sejak tahun 1998, difasilitasi oleh tokoh masyarakat setempat. Kehadiran penduduk pendatang tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah desa serta akulturasi pengetahuan budidaya pertanian dan kehutanan dengan masyarakat setempat. Namun demikian, kehadiran masyarakat pendatang juga memiliki potensi konflik dengan masyarakat setempat serta berpotensi merusak sumberdaya hutan.

2. Tenaga Kerja Keluarga

Kepala keluarga yang menjadi tulang punggung tenaga kerja rumah tangga petani di

lokasi penelitian pada umumnya adalah tenaga kerja produktif dengan umur > 20 tahun. Dalam menjalankan aktivitas usahatani, kepala keluarga dibantu oleh anggota keluarga usia produktif, baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah tanggungan keluarga setiap kepala keluarga rata-rata sebanyak 3 orang.

Pertumbuhan penduduk usia kerja masyarakat di sekitar hutan berpotensi untuk menekan sumberdaya hutan, apabila potensi tenaga kerja tersebut tidak mempunyai alternatif mata pencaharian selain usahatani. Hal ini disebabkan karena sumberdaya hutan merupakan sumberdaya terdekat, termudah, dan termurah bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas usahatani.

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat adalah petani kakao, sawit, beternak, dan usaha lainnya yang bersifat musiman. Terdapat juga beberapa orang pedagang kayu.

Masyarakat menata lahan usahatani sesuai kondisi fisik lahan yaitu, lahan dengan kelerengan 0 - 25 % dikelola sebagai areal usahatani kelapa sawit, lahan dengan kelerengan 25 - 40% dikelola sebagai lahan usahatani kebun kakao, sedangkan lahan dengan kelerengan diatas 40% ditanami dengan jenis kayu-kayuan.

4. Pemanfaatan Kawasan Hutan oleh Masyarakat

Aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan pada dasarnya terbagi dua yaitu, pemanfaatan kawasan hutan sebagai lahan usahatani, dan pemungutan hasil

hutan. Hasil usaha tersebut sebagian besar dikonsumsi sendiri secara langsung, dan sebagian lainnya dijual dalam bentuk bahan mentah dan atau dijual setelah diolah lebih lanjut seperti usaha produksi gula aren.

Hasil survey dan FGD menunjukkan bahwa masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan menyadari bahwa aktivitas di dalam kawasan hutan yang tidak melalui proses perizinan adalah bersifat ilegal. Namun demikian, pada banyak kasus, batas-batas kawasan hutan (TGHK) tidak diakui oleh masyarakat, sehingga aktivitas mereka di dalam kawasan hutan dianggap tidak ilegal. Aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan terjadi karena faktor-faktor historis, faktor biologis, faktor fisik lahan, dan faktor ekonomi.

Faktor biologi terkait adanya tanaman yang ditanam oleh masyarakat di dalam kawasan hutan, baik sebelum maupun setelah TGHK. Faktor fisik lahan terkait dengan kondisi fisik lahan yang memang mempunyai potensi untuk dikelola oleh masyarakat sebagai areal tanaman semusim atau areal tanaman kebun, misalnya pada lahan kawasan hutan yang bertopografi datar dan subur. Sedangkan faktor ekonomi terkait dengan pertumbuhan penduduk yang berdampak kepada meningkatnya permintaan lahan usahatani.

Kondisi tersebut di atas memerlukan pemantapan kawasan hutan melalui kegiatan-kegiatan rekonstruksi tata batas atau penataan ulang kawasan hutan. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan kondisi riil kawasan hutan yang sudah sangat berbeda dengan data yang ada di peta kawasan hutan. Faktor penyebabnya adalah, tidak jelasnya batas-batas kawasan hutan di lapangan, hilangnya pal batas kawasan hutan, dan tidak diakuinya

batas-batas kawasan hutan oleh masyarakat.

Penataan kawasan hutan adalah masalah mendasar dalam rangka peningkatan usaha masyarakat di dalam kawasan hutan. Hal ini mengingat bahwa tataguna kawasan hutan yang ada saat ini masih bersifat makro, sementara pada level mikro, terdapat lahan-lahan di dalam kawasan hutan yang mempunyai sifat fisik sesuai untuk dikelola sebagai kawasan budidaya. Penatagunaan secara mikro kawasan hutan tersebut akan berdampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan, yakni terbukanya peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan spot-spot lahan kawasan hutan yang secara fisik memungkinkan untuk dikelola sebagai kawasan budidaya. Pemanfaatan spot-spot lahan kawasan hutan tersebut harus tetap kompatibel dengan fungsi kawasan hutan.

Pemantapan kawasan hutan melalui penataan kawasan hutan secara mikro, merupakan salah satu faktor kunci dalam program peningkatan usaha masyarakat di dalam kawasan hutan. Kawasan hutan yang mantap dan tertata secara makro dan mikro akan memperkuat status hukum kawasan hutan serta menjamin keamanan masyarakat berusaha di dalam kawasan hutan. Fakta menunjukkan bahwa salah satu pemicu praktek-praktek ilegal yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan adalah karena tidak mantapnya tata batas kawasan hutan dan tidak terjaminnya

keamanan berusaha masyarakat untuk jangka waktu yang panjang.

Pemantapan dan penataan kawasan hutan dapat berwujud pembagian zonasi kawasan hutan yang mengintegrasikan aspek biofisik kawasan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, serta mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

B. Permasalahan Umum Pengelolaan Hutan

Pembangunan kehutanan telah memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian melalui berbagai macam aktivitas baik yang bersifat *legal* maupun *illegal*. Pada sisi yang lain, pembangunan kehutanan telah menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari segi sosial ekonomi, dampak pembangunan kehutanan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan tidak cukup nyata akibat kurangnya akses dan peran masyarakat dalam proses pembangunan kehutanan. Dari segi sumberdaya, telah terjadi degradasi yang disebabkan oleh pengelolaan hutan yang tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan pembangunan non kehutanan (seperti, perkebunan besar, dan transmigrasi), illegal logging, kebakaran hutan, dan perambahan oleh masyarakat.

Hasil FGD dengan masyarakat di sekitar hutan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju disimpulkan permasalahan umum pengelolaan kawasan hutan seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Permasalahan Umum Pengelolaan Hutan

No.	Masalah Umum	Fenomena Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Lokasi Penelitian
1.	Inventarisasi SDH dan Tata Guna Lahan	a. Tata batas kawasan hutan belum tuntas. b. Klaim terhadap kawasan karena tata batas kawasan hutan tidak jelas, dan belum tersosialisasi. c. Inventarisasi potensi dan pemanfaatan SDH mendesak untuk dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan SDH yang berkelanjutan.
2.	Pengelolaan Hutan Produksi	a. Areal eks HPH yang ditelantarkan b. Usaha kehutanan skala rumah tangga belum berkembang. c. Kawasan hutan rawan illegal logging
3.	Industri Hasil Hutan dan Perdagangan	a. Industri pengolahan hasil hutan skala kecil-menengah belum berkembang. b. Bahan baku industri pengolahan hasil hutan masih mengandalkan dari hutan alam. c. Belum terbangun mekanisme kemitraan antara industri pengolahan kayu/non kayu dan masyarakat yang menjamin kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.
4.	Pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat	a. Belum ada alokasi kawasan hutan sebagai areal kelola masyarakat yang legal b. Kapasitas SDM dalam hal pengelolaan sumberdaya hutan belum memadai.
5.	Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Lahan	a. Masih luas lahan kritis dalam kawasan hutan b. Ketergantungan masyarakat lokal terhadap kawasan hutan sebagai lahan usahatani c. Perambahan kawasan hutan oleh masyarakat pendatang

Tabel 1 (lanjutan).

No.	Masalah Umum	Fenomena Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Lokasi Penelitian
6.	Tenurial	a. Klaim kawasan hutan oleh oknum tokoh masyarakat setempat. b. Adanya pemberian izin pembukaan lahan dalam kawasan hutan oleh tokoh masyarakat setempat. c. Konflik penguasaan lahan kawasan hutan antara oknum tokoh masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang
7.	Penanganan Masalah illegal logging	a. Komitmen aparat penegak hukum dalam penanggulangan illegal logging belum dilaksanakan secara tegas. b. Kurang jelasnya peran masyarakat, pemerintah desa, aparat kecamatan di dalam penanggulangan illegal logging. c. Belum tertibnya sistem administrasi dokumen peredaran hasil hutan.
8.	Peningkatan Kemampuan dan Penguatan Kelembagaan	a. Belum adanya kelembagaan pada level unit pengelolaan hutan. b. SDM kehutanan terbatas
9.	Pendanaan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	a. Belum ada lembaga keuangan di desa yang memfasilitasi masyarakat mengelola hutan. b. Masyarakat membutuhkan subsidi pemerintah untuk mengelola hutan c. Pendanaan pengelolaan hutan mengikuti pola keproyekan, tidak bersifat program yang bersifat <i>multi years</i> .

Hasil FGD tersebut pada Tabel 1 disimpulkan permasalahan umum pengelolaan hutan mencakup masalah ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Masalah ekonomi terkait dengan, belum berkembangnya usaha kehutanan skala rumah tangga, alokasi kawasan hutan untuk dikelola secara legal oleh masyarakat, industri pengelolaan, illegal logging, dan aspek pendanaan

pengelolaan hutan. Masalah sosial terkait dengan migrasi masuk penduduk, konflik lahan, perambahan, dan kapasitas sumberdaya manusia yang rendah. Masalah kelembagaan terkait dengan perizinan usaha kehutanan (HPH/IUPHHK, ISL), kemitraan masyarakat dengan HPH/IUPHHK dan industri pengelolaan hasil hutan, dan

kelembagaan kehutanan pada level unit pengelolaan hutan.

C. Konsep Pengembangan Usaha Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan

Mengacu kepada uraian sebelumnya, maka dirumuskan konsep pengembangan usaha masyarakat di dalam kawasan hutan sebagai berikut:

1. Konsep Pengembangan Sistem Produksi

Pembangunan kehutanan diarahkan pada pengembangan unit usaha masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. Unit usaha tersebut harus dikelola sebagai suatu unit bisnis berbasis masyarakat. Pengelolaan unit bisnis berbasis masyarakat diarahkan pada aglomerasi usahatani masyarakat yakni, (1) memadukan unit usahatani masyarakat di dalam kawasan hutan dan unit usahatani di luar kawasan hutan, (2) mengintegrasikan sub-sub sistem yang terkait dengan pengembangan unit usahatani, terutama yang terkait dengan pasar faktor-faktor produksi dan pasar hasil produksi.

Pengelolaan usahatani yang tidak teraglomerasi dan tidak terintegrasi menyebabkan nilai ekonomi usahatani masyarakat relatif rendah, yang pada akhirnya bermuara kepada pengelolaan unit bisnis yang tidak berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha masyarakat adalah memperkuat kelembagaan usaha, yang mencakup aspek legalitas usaha dan aspek kelembagaan unit usaha.

Legalitas usahatani masyarakat di dalam kawasan hutan saat ini sangat lemah karena tidak melalui prosedur standar perizinan usaha

kehutanan sesuai peraturan yang ada. Sedangkan kelembagaan unit usaha adalah bersifat individu menyebabkan posisi tawar petani tidak kuat untuk mengakses faktor-faktor produksi dan pasar hasil-hasil produksi. Dengan demikian, program pengelolaan hutan harus memfasilitasi penguatan legalitas kelembagaan usaha masyarakat sesuai prosedur standar perizinan usaha kehutanan dan memfasilitasi penguatan unit usaha dengan mempersatukan kekuatan unit-unit usaha individu petani menjadi unit usaha berkelompok.

2. Konsep Pengembangan Kelembagaan Usaha

Konsep pengembangan kelembagaan usaha masyarakat mencakup: (1) penyediaan lembaga usaha yang berbadan hukum yang menjalankan bisnis hasil-hasil produksi masyarakat, (2) penyediaan lembaga usaha masyarakat yang memainkan peran dalam menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait seperti HPH/IUPHHK, Bank atau lembaga keuangan lainnya, BUMN, BUMD, instansi terkait, dan lembaga donor, (3) penyediaan lembaga usaha masyarakat yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan pasar hasil-hasil para petani, (4) penyediaan lembaga usaha yang memiliki rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam lingkup pengelolaan hutan lestari.

Unit usahatani masyarakat di lokasi penelitian adalah individu-individu rumah tangga. Hal ini menyebabkan unit usahatani tidak efisien untuk mengakses pasar faktor-faktor produksi dan tidak efisien mengakses pasar hasil produksi, yang berdampak kepada

rendahnya nilai usaha masyarakat. Selain itu, masalah-masalah teknis produksi, pengolahan dan pemasaran hasil usaha tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh unit usaha yang bersifat individu rumah tangga petani.

Tipologi usaha masyarakat seperti diuraikan di atas disebabkan oleh lemahnya sistem kelembagaan usaha masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan konsep pengembangan sistem kelembagaan usaha untuk mengembangkan bisnis berbasis kehutanan. Konsep ini mencakup, pemberdayaan kelembagaan unit usahatani (petani) dan pemberdayaan sub sistem yang terkait dengan unit usahatani seperti, pedagang lokal, lembaga pemerintah desa, serta lembaga-lembaga penyangga seperti perguruan tinggi, LSM, dan dunia usaha.

Pemberdayaan kelembagaan unit usahatani, pada tahap awal, dilakukan dengan memperkuat unit usahatani (petani) dan usaha yang ada. Potensi yang dimiliki oleh unit usahatani (petani) diperkuat, sampai unit usahatani tersebut mempunyai kemampuan kelembagaan untuk dapat bersaing dengan kelembagaan lain yang terkait. Kelembagaan penyuluh, lembaga pemerintahan desa, LSM, dan perguruan tinggi diharapkan menjadi fasilitator inti pada tahap awal proses penguatan kelembagaan unit usahatani.

Lembaga usaha yang perlu untuk segera dibentuk adalah "Kelompok Usaha Bersama" (KUB). KUB merupakan sebuah lembaga yang dibentuk melalui kesepakatan masyarakat multi pihak dan merupakan sarana bagi masyarakat untuk, (1) melakukan simpan pinjam, (2)

menjadi penjamin untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait seperti Bank atau lembaga keuangan lainnya, BUMN, BUMD, instansi terkait, dan pihak donor, (3) menjadi pusat informasi perdagangan komoditi, dan (4) sarana bagi anggota KUB untuk belajar mandiri membangun lembaga usaha yang tangguh misalnya koperasi. KUB diharapkan dapat menjadi "Bank Mini" yang menerapkan bagi hasil kepada semua anggotanya bila mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada setiap periode.

Indikator kuatnya kelembagaan unit usahatani KUB dapat dilihat dari kemampuan negosiasi, kemampuan teknik budidaya, kemampuan modal, dan kemampuan pasar. Apabila kelembagaan KUB sudah kuat, maka tahap selanjutnya adalah membangun jaringan kemitraan dengan kelembagaan lain yang lebih besar, terutama kelembagaan yang berasal dari luar desa seperti pedagang, pemodal besar, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat mengenai aspek-aspek tertentu yang membutuhkan fasilitasi dari pihak luar seperti pasar, peningkatan mutu, daya saing, permodalan, pengembangan industri pengolahan, dan lain-lain. Kemitraan antara KUB dengan dunia usaha ini harus diikat dalam sebuah perjanjian kerjasama sehingga dunia usaha memperoleh kepastian berusaha dan petani mendapatkan kepastian keberlanjutan usaha.

Pada tahap pengembangan selanjutnya, kelembagaan KUB diharapkan menjadi cikal bakal koperasi usaha berbasis kehutanan.

3. Konsep Pengembangan Sistem Pendukung

Dalam pengembangan bisnis berbasis kehutanan di lokasi penelitian, terdapat suatu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan sejak awal, yaitu keseimbangan kekuatan negosiasi (*negotiating power*) antar stakeholders. Tanpa keseimbangan ini maka perjalanan pengembangan bisnis berbasis kehutanan akan pincang dan pada akhirnya akan terhenti dan bubar. Para peneliti dan tim pakar perlu terus menerus memonitor dan menganalisis dan mengevaluasi perjalanan keseimbangan ini.

Hal yang perlu dimonitor sejak awal adalah munculnya stakeholder yang terlalu kuat seperti kejadian dalam banyak kasus Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang mempunyai kemampuan negosiasi yang sangat kuat dengan masyarakat lokal yang tidak memiliki kekuatan negosiasi sama sekali. Sebelum jejaring (*network*) kemitraan dibangun, masyarakat lokal memerlukan pendampingan untuk membentuk "Kelompok Usaha Bersama (KUB)" yang terus menerus harus dibina agar kelak usaha bersama tersebut dapat menjadi badan usaha koperasi yang kuat, dan memiliki kemampuan negosiasi yang kuat untuk dapat ikut dalam jejaring kemitraan.

Kalau badan usaha koperasi sudah terbentuk dan menjadi kuat, barulah dapat dibangun jejaring yang anggota-anggota stakeholdernya relatif seimbang. Kalau tidak, maka masyarakat tidak akan memiliki *negotiating power* yang cukup untuk dapat mengambil peranan dalam sistem jejaring. Kalau demikian, masyarakat lokal akan menjual hak penguasaan

lahannya dan masuk lagi mencari lahan di kawasan hutan untuk mereka jadikan ladang baru.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Telah terjadi akulturasi pengetahuan budidaya pertanian dan kehutanan antara masyarakat penduduk asli dengan masyarakat pendatang yang berdampak terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
2. Permasalahan umum pengelolaan hutan mencakup masalah ekonomi yang terkait dengan usahatani masyarakat di dalam kawasan hutan, masalah sosial yang terkait dengan kependudukan, dan masalah kelembagaan yang terkait dengan unit usaha masyarakat.
3. Konsep pengembangan usaha masyarakat di dalam kawasan hutan mencakup, pengembangan sistem produksi, pengembangan kelembagaan usaha, dan pengembangan sistem pendukung.

B. Saran

Pemerintah dan pemerintah daerah segera membentuk kelembagaan pengelolaan hutan pada level unit pengelolaan yang akan memberikan pelayanan untuk mendukung berkembangnya usaha masyarakat di dalam kawasan hutan dan terkelolanya sumberdaya hutan secara lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani. W. 2003. Strategi Peningkatan Efisiensi Usaha Perhutanan Rakyat. Jurnal Hutan Rakyat, Vol. V, No. 3. Pustaka Hutan Rakyat. Yogyakarta.
- Bhargava. K.S.1993. Policy Legislation and Community Forestry. Proceeding of A workshop Held in Bangkok, Jan 27 – 29, 1993. RECOFTC, Bangkok.
- Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan. 1999. Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan. Jakarta.
- Davis. S. Lawrence, dan K.N. Johnson, 1987. Forests Management. Third Edition. Mc. Graw-Hill Book Company. New York, St. Louis, San Fransisco, Toronto, London, Sydney.
- Dinas Pertanian Kabupaten Maros, 2002. Nota Dinas Penugasan Kepala Resort Pemangku Hutan. Dinas Pertanian Kabupaten Maros. Maros.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kabupaten Maros, 2004. Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros Tahun 2005 – 2009. Maros.
- Junus. M., 2006. Urgensi Desa Dalam Pengelolaan Hutan dan Pelayanan Wilayah Mikroforestry.
- Pemda Kabupaten Maros. 2001. Final Report Rencana Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kabupaten Maros. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Maros.
- Pemda Kabupaten Maros. 2005. Keputusan Bupati Maros Nomor: 230a/Kpts/660/VII/2005, tentang Penunjukan Pengawas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan serta Penebangan Liar di Kabupaten Maros. Sekretariat Daerah Kabupaten Maros. Maros.

Diterima 25 Oktober 2007

Supratman

Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan,
Fakultas Kehutanan,
Universitas Hasanuddin,
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telp./Fax. 0411-585917 Indonesia